

Optimalisasi Tata Kelola Aset Kampung Wisata Sawah melalui Pendampingan Pengendalian Internal Berbasis SOP

Audra Nailufar¹, Inggrit Larasati Br Panggabean², Linda Wahyu Marpaung³, Stephanie Ongky⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya

*Corresponding author

E-mail: audranailuvar@gmail.com (Audra Nailufar)*

Article History:

Received: July, 2026

Revised: August, 2026

Accepted: August, 2026

Abstract: *Pengelolaan aset Kampung Wisata Sawah Desa Pematang Johar masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya inventaris aset yang terdokumentasi, kode identifikasi aset, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan aset. Pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola aset melalui penerapan sistem pengendalian internal berbasis SOP. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Learning and Action Research (PALAR) dengan tahapan identifikasi kebutuhan, inventarisasi aset, penyusunan buku inventaris, pemberian kode aset, penyusunan SOP, pelatihan, pendampingan implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya buku inventaris aset, diterapkannya kode inventaris pada aset yang teridentifikasi, tersusunnya SOP Pengelolaan Aset, serta meningkatnya pemahaman dan kemampuan pengelola dalam menerapkan administrasi aset berbasis pengendalian internal. Program ini berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada Kampung Wisata Sawah.*

Keywords:

Kampung Wisata Sawah; Pengendalian Internal; SOP; Tata Kelola Aset

Pendahuluan

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi pembangunan berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi lokal, baik sumber daya alam, budaya, maupun ekonomi kreatif. Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik destinasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola organisasi yang mampu menjamin efektivitas operasional, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan aset. Aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan berperan penting dalam mendukung aktivitas operasional organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan aset memerlukan sistem administrasi yang tertib, mulai dari proses

inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari risiko kehilangan maupun penyalahgunaan (Arens et al., 2020). Penerapan sistem pengendalian internal juga menjadi instrumen penting dalam melindungi aset organisasi melalui penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan (COSO, 2013).

Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata. Desa ini memiliki luas lahan persawahan sekitar 1.750 hektare dengan produktivitas rata-rata 7 ton gabah per hektare setiap musim panen. Potensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi Kampung Wisata Sawah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Johar Mandiri Jaya sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis wisata pertanian. Selain sektor pertanian, masyarakat juga mengembangkan berbagai usaha produktif seperti batik sawah, kuliner lokal, peternakan, dan usaha mikro yang mendukung aktivitas wisata. Seiring berkembangnya kawasan wisata, jumlah aset yang dimiliki terus bertambah, meliputi gazebo, jembatan, area swafoto, fasilitas pelayanan pengunjung, papan informasi, serta berbagai peralatan operasional yang memerlukan sistem pengelolaan yang baik agar keberadaannya tetap terjaga dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama pemerintah desa serta pengelola Kampung Wisata Sawah, ditemukan bahwa pengelolaan aset masih menghadapi berbagai kendala. Inventarisasi aset belum terdokumentasi secara lengkap, sebagian aset belum memiliki kode identifikasi, pencatatan kondisi aset belum dilakukan secara berkala, serta belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses pengadaan, penggunaan, peminjaman, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset belum terdokumentasi secara jelas sehingga mekanisme pengawasan masih bersifat sederhana. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kehilangan aset, kerusakan yang tidak segera ditindaklanjuti, penggunaan aset yang tidak sesuai prosedur, serta rendahnya akuntabilitas pengelolaan aset wisata. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap efektivitas operasional, keandalan informasi, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan (COSO, 2013). Dalam konteks pengelolaan aset desa wisata, implementasi pengendalian internal

dapat diwujudkan melalui penyusunan SOP, inventarisasi aset, pemberian kode identifikasi, pembagian tugas yang jelas, serta monitoring secara berkala sehingga tata kelola aset menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penerapan pengendalian internal pada organisasi desa mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki (Oktaviani & Nuswantara, 2020).

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penguatan tata kelola organisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan desa wisata. Cahyaningsih et al., (2026) menyatakan bahwa pelatihan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata dalam mengelola organisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian pula, Fatikasari & Mustofa, (2025) menjelaskan bahwa tata kelola aset yang transparan, terdokumentasi, dan partisipatif berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan desa wisata. Sementara itu, Nailufar et al., (2024) menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan nilai ekonomi aset daerah maupun aset yang dikelola oleh organisasi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian yang telah dilakukan masih berfokus pada pengelolaan keuangan, digitalisasi pemasaran, atau pemberdayaan UMKM, sedangkan pendampingan yang secara khusus mengintegrasikan sistem pengendalian internal dengan penyusunan SOP dan administrasi pengelolaan aset pada destinasi wisata berbasis masyarakat masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi *research gap* sekaligus kebaruan (*novelty*) dalam kegiatan pengabdian ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kampung Wisata Sawah dipilih sebagai mitra pengabdian karena memiliki potensi ekonomi yang besar, dukungan pemerintah desa yang kuat, serta kebutuhan nyata terhadap penguatan tata kelola aset. Program pengabdian ini difokuskan pada optimalisasi tata kelola aset melalui pendampingan pengendalian internal berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning and Action Research* (PALAR). Pendekatan ini melibatkan mitra secara aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, implementasi, hingga evaluasi sehingga menghasilkan sistem pengelolaan aset yang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mudah diterapkan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan sosial berupa meningkatnya kapasitas aparatur desa dan pengelola Kampung Wisata Sawah dalam mengelola aset secara tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain menghasilkan buku inventaris aset, kode inventaris, dan SOP Pengelolaan Aset, program ini juga diharapkan menjadi model penguatan tata kelola aset yang dapat

direplikasi pada desa wisata lainnya sebagai upaya mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Kampung Wisata Sawah, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Subjek pengabdian adalah aparatur Pemerintah Desa Pematang Johar, pengelola Kampung Wisata Sawah, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Johar Mandiri Jaya, pelaku usaha pendukung wisata, serta perwakilan pemuda desa yang berperan dalam pengelolaan kawasan wisata. Sasaran tersebut dipilih karena memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan aset wisata, mulai dari penggunaan, pemeliharaan, hingga pengawasan aset yang mendukung operasional Kampung Wisata Sawah.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning and Action Research* (PALAR), yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan mitra sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan serta dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Melalui pendekatan PALAR, proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, implementasi program, hingga evaluasi dilakukan secara kolaboratif antara tim pengabdian dan mitra sehingga tercipta rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap seluruh luaran program.

Keterlibatan subjek dampingan dimulai sejak tahap perencanaan kegiatan. Pemerintah Desa, pengelola Kampung Wisata Sawah, dan BUMDes Johar Mandiri Jaya bersama tim pengabdian melaksanakan koordinasi awal untuk mengidentifikasi kondisi eksisting pengelolaan aset, menyepakati permasalahan prioritas, menentukan kebutuhan program, serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, mitra berpartisipasi aktif dalam proses inventarisasi aset melalui penyediaan data aset, pendampingan observasi lapangan, verifikasi kondisi aset, serta pemberian masukan terhadap penyusunan dokumen administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Keterlibatan aktif tersebut bertujuan agar perangkat administrasi yang disusun sesuai dengan kondisi operasional Kampung Wisata Sawah dan dapat diterapkan secara berkelanjutan setelah program berakhir.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kombinasi observasi lapangan, wawancara, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), pelatihan, praktik langsung, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Observasi dan

wawancara digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal pengelolaan aset dan kebutuhan mitra. Diskusi kelompok dilakukan untuk menggali permasalahan, menyusun alternatif solusi, dan memvalidasi rancangan SOP bersama mitra. Pelatihan dan praktik langsung digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan aset dan sistem pengendalian internal, sedangkan pendampingan dilakukan untuk memastikan implementasi SOP dapat diterapkan secara efektif dalam kegiatan operasional sehari-hari. Diagram Alir Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan PKM

Tahapan kegiatan pengabdian terdiri atas enam tahap. Tahap pertama adalah persiapan dan koordinasi, yaitu penyamaan persepsi dengan mitra, observasi awal, serta identifikasi kondisi pengelolaan aset. Tahap kedua adalah identifikasi permasalahan dan inventarisasi aset melalui pendataan aset berdasarkan nama, jumlah, kondisi, lokasi, fungsi, dan penanggung jawab. Tahap ketiga adalah

penyusunan administrasi pengelolaan aset, meliputi penyusunan buku inventaris aset, pemberian kode inventaris, penyusunan formulir administrasi aset, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Aset. Tahap keempat berupa pelatihan dan pendampingan, yaitu pemberian materi mengenai tata kelola aset, sistem pengendalian internal, penggunaan buku inventaris, serta implementasi SOP kepada pengelola Kampung Wisata Sawah. Tahap kelima adalah implementasi SOP, melalui pendampingan penerapan prosedur inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan monitoring aset dalam kegiatan operasional. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi, dan penyebaran kuesioner untuk menilai tingkat pemahaman peserta serta keberhasilan implementasi SOP berdasarkan indikator ketercapaian luaran, yaitu tersusunnya buku inventaris aset, penerapan kode inventaris, implementasi SOP, serta meningkatnya ketertiban administrasi dan kapasitas pengelola dalam mengelola aset wisata. Seluruh dokumen administrasi selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Desa dan pengelola Kampung Wisata Sawah sebagai pedoman operasional untuk mendukung keberlanjutan program.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pkm pendampingan pengelolaan aset kampung wisata sawah melalui penerapan SOP disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. Jadwal Pelaksanaan PKM

Hasil

1. Pelaksanaan Kegiatan PkM

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) telah dilaksanakan di Aula Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan diikuti oleh sekitar 30 peserta yang terdiri atas aparatur pemerintah desa, pengelola sektor wisata, pelaku sektor informal, serta perwakilan pemuda desa yang memiliki peran dalam pengembangan Kampung Wisata Sawah.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning and Action Research (PALAR)* yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mengintegrasikan pengalaman peserta, refleksi kritis, diskusi kelompok, simulasi, serta penyusunan rencana aksi bersama sehingga proses pendampingan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong peserta untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyusun solusi sesuai kondisi di lapangan.



Gambar 3. Lokasi Kegiatan Kampung Wisata Sawah, Desa Pematang Johar

Tahapan kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan program, dilanjutkan dengan identifikasi kondisi pengelolaan aset Kampung Wisata Sawah melalui diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*). Selanjutnya tim PKM memberikan materi mengenai konsep pengelolaan aset, pentingnya sistem pengendalian internal, administrasi inventaris aset, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset. Setelah sesi penyampaian materi, peserta mengikuti praktik penyusunan buku

inventaris aset sederhana, pemberian kode inventaris, dan simulasi penerapan SOP dalam kegiatan operasional pengelolaan aset wisata.



Gambar 4. Kata Sambutan dari Kepala Desa Pematang Johar

Melalui diskusi partisipatif, peserta bersama tim PKM berhasil mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan aset, antara lain belum adanya pencatatan aset secara sistematis, belum tersedianya kode inventaris, belum adanya pedoman tertulis mengenai penggunaan dan pemeliharaan aset, serta belum optimalnya pembagian tugas dalam pengelolaan aset wisata. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen administrasi aset dan SOP yang disesuaikan dengan kondisi Kampung Wisata Sawah.



Gambar 5. Pelaksanaan Workshop Kegiatan PkM

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa program telah menghasilkan beberapa luaran utama sesuai dengan tujuan pengabdian, yaitu

tersusunnya buku inventaris aset sederhana, pemberian kode inventaris pada aset yang telah teridentifikasi, serta tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Aset Kampung Wisata Sawah. Selain menghasilkan dokumen administrasi, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan aset yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selama proses pendampingan, peserta menunjukkan partisipasi aktif dalam setiap sesi kegiatan. Diskusi kelompok menghasilkan berbagai masukan yang kemudian diakomodasi dalam penyempurnaan SOP sehingga dokumen yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola wisata. Pendekatan PALAR memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, melakukan refleksi terhadap praktik pengelolaan aset yang selama ini dilakukan, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan secara bertahap.



Gambar 6. Gambaran keberhasilan pelaksanaan program

Diskusi

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Wisata Sawah, Desa Pematang Johar menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan secara partisipatif mampu memberikan perubahan positif terhadap tata kelola aset desa wisata. Sebelum kegiatan dilaksanakan, hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih dilakukan secara sederhana,

ditandai dengan belum tersedianya inventaris aset yang terdokumentasi, belum adanya kode identifikasi aset, serta belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam proses penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan aset. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan aset belum memiliki mekanisme administrasi yang terstruktur sehingga berpotensi meningkatkan risiko kehilangan aset, penyalahgunaan, maupun rendahnya akuntabilitas pengelolaan.

Perubahan mulai terlihat sejak tahap identifikasi kebutuhan dan perencanaan program. Pendekatan *Participatory Action Learning and Action Research* (PALAR) memberikan ruang bagi aparat desa, pengelola Kampung Wisata Sawah, dan BUMDes untuk terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan kebutuhan, serta merumuskan solusi bersama tim pengabdian. Keterlibatan tersebut menciptakan proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif sehingga solusi yang dihasilkan bukan hanya berasal dari tim pelaksana, tetapi juga merupakan hasil kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan kondisi operasional mitra. Proses ini memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap seluruh luaran program sehingga meningkatkan komitmen mitra dalam mengimplementasikan hasil kegiatan secara berkelanjutan.

Tahap inventarisasi aset menjadi langkah penting dalam membangun sistem administrasi aset yang sebelumnya belum tersedia. Melalui pendataan aset berdasarkan jenis, jumlah, kondisi, lokasi, fungsi, dan penanggung jawab, pengelola memperoleh informasi yang lebih sistematis mengenai seluruh aset yang dimiliki. Hasil inventarisasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan buku inventaris aset, pemberian kode identifikasi, formulir administrasi aset, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Aset. Penyusunan SOP secara partisipatif menjadikan dokumen yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi operasional Kampung Wisata Sawah sehingga memiliki peluang implementasi yang lebih tinggi dibandingkan apabila disusun secara sepihak.

Pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada pengelola tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai administrasi aset, tetapi juga mengubah cara pandang peserta terhadap pentingnya sistem pengendalian internal dalam mendukung tata kelola organisasi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum terbiasa menggunakan dokumen administrasi maupun prosedur tertulis dalam pengelolaan aset. Setelah mengikuti pelatihan dan praktik langsung, peserta mulai mampu menggunakan buku inventaris, menerapkan kode inventaris, serta memahami alur penggunaan dan pemeliharaan aset sesuai SOP yang telah disusun. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi

sistem pengendalian internal pada organisasi berbasis masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal ditentukan oleh lima komponen utama, yaitu *control environment*, *risk assessment*, *control activities*, *information and communication*, serta *monitoring activities*. Implementasi kelima komponen tersebut pada kegiatan pengabdian ini diperkuat oleh hasil penelitian Nailufar et al., (2026) yang membuktikan bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas organisasi melalui penguatan mekanisme pengendalian dan pencegahan penyimpangan. Dalam kegiatan pengabdian ini, kelima komponen tersebut diimplementasikan melalui pembagian tugas yang lebih jelas, inventarisasi aset, penyusunan SOP, dokumentasi administrasi, serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan aset. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi diterapkan dalam bentuk prosedur kerja yang sederhana, terdokumentasi, dan mudah dijalankan oleh pengelola desa wisata.

Hasil pengabdian juga mendukung penelitian Oktaviani & Nuswantara, (2020) yang menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal pada organisasi desa mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi melalui pembagian tugas yang jelas, penguatan dokumentasi administrasi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Dalam konteks Kampung Wisata Sawah, penerapan administrasi aset dan SOP memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pengelola dalam melaksanakan proses inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, hingga pelaporan aset sehingga risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan aset dapat diminimalkan.

Selain itu, hasil kegiatan ini memperkuat temuan Cahyaningsih et al., (2026) yang menjelaskan bahwa pelatihan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata dalam menerapkan tata kelola organisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian pula, Fatikasari & Mustofa, (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola aset yang transparan, terdokumentasi, dan partisipatif. Kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa penyusunan buku inventaris aset, kode inventaris, dan SOP tidak hanya menghasilkan dokumen administrasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih tertib, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset, serta memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola Kampung Wisata Sawah.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, perubahan sosial yang terjadi tidak hanya diukur dari tersusunnya luaran fisik berupa buku inventaris, kode inventaris, dan SOP, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan aparatur desa dan pengelola dalam mengelola aset secara mandiri. Pemerintah Desa Pematang Johar menunjukkan komitmennya untuk menjadikan SOP Pengelolaan Aset sebagai pedoman operasional serta melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pengabdian telah menghasilkan perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku pengelola dalam mengelola aset desa wisata secara lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan administrasi aset yang dihadapi mitra, tetapi juga membangun fondasi tata kelola organisasi yang lebih baik sebagai upaya mendukung keberlanjutan Kampung Wisata Sawah sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat.

Kesimpulan

Program Pengabdian kepada Masyarakat di Kampung Wisata Sawah, Desa Pematang Johar berhasil mengoptimalkan tata kelola aset melalui pendampingan penerapan sistem pengendalian internal berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan yang dilaksanakan secara partisipatif menghasilkan luaran berupa buku inventaris aset, kode identifikasi aset, serta SOP Pengelolaan Aset yang menjadi pedoman dalam proses inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan aset. Selain itu, kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa serta pengelola wisata dalam menerapkan administrasi aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Penerapan pendekatan *Participatory Action Learning and Action Research* (PALAR) mendorong keterlibatan aktif mitra sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga memperkuat rasa memiliki terhadap luaran program dan mendukung keberlanjutan implementasinya. Program ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan aset yang dihadapi mitra, tetapi juga menjadi model penguatan tata kelola aset berbasis pengendalian internal yang dapat direplikasi pada desa wisata lainnya dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eka Prasetya, khususnya Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), atas dukungan akademik, fasilitasi, dan pendampingan selama pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pematang Johar, BUMDes Johar Mandiri Jaya, serta seluruh pengelola Kampung Wisata Sawah atas kerja sama, partisipasi aktif, dan komitmennya dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, implementasi program, hingga evaluasi. Apresiasi turut diberikan kepada seluruh mahasiswa yang tergabung dalam tim pelaksana atas kontribusi, dedikasi, dan partisipasinya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat dalam penguatan tata kelola aset Kampung Wisata Sawah.

Daftar Referensi

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2020). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (17th ed.)*.
- Cahyaningsih, Saraswati, R. S., Pratomo, D., & Muhaemi, E. (2026). Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Keuangan untuk Mendukung Pengelolaan Usaha Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Atma Inovasia*, 6(1), 1–6.
- COSO. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*.
- Fatikasari, R., & Mustofa, R. H. (2025). Governance of Village Asset Management in Supporting the Development of a Successful Tourism Village : A Case Study of Wunut Village , Klaten Regency. *Journal of Governance and Social Policy*, 6(2), 633–653. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v6i2.45>
- Nailufar, A., Panggabean, I. L., Hakiki, D., & Sari, E. N. (2024). Optimizing Regional Asset Utilization: Literature Review. *Proceeding Medan International Conference on Economic and Business*, 2(1), 375–383.
- Nailufar, A., Sari, E. ., & Dahrani. (2026). Effectiveness Of Internal Control Systems And Good University Governance On Fraud Prevention With Organizational Commitment. *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 13(1), 21–35.
- Oktaviani, L., & Nuswantara, D. A. (2020). Keterterapan Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Sidoarjo. *Matra Pembaruan*, 4(2), 83–92. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.83-92>